

# Pengambilan keputusan dan diversifikasi pelaku anak: studi kasus Bullying Thamrin City = Decision making and diversion of children in conflict with the law: a case study Bullying at Thamrin City / Ayu Tri Umami

Ayu Tri Umami, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20467341&lokasi=lokal>

---

## Abstrak

### <b>ABSTRAK</b><br>

Salah satu kasus yang di tangani oleh Unit PPA Polres Jakarta Pusat adalah aksi bullying terhadap anak dibawah umur di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta oleh beberapa anak teman sekolahnya. Dalam menangani kasus tersebut pihak kepolisian berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 Dua Belas Tahun menerapkan restorative justice dengan melaksanakan diversifikasi untuk pelaku anak yang berusia 12 tahun keatas dan pengambilan keputusan untuk anak yang berusia 12 tahun ke bawah. Dalam pertemuan yang dihadiri oleh pihak korban dan pelaku anak beserta keluarga, pendamping masyarakat, penasehat hukum, Psikologi Divisi Pelayanan dan Pemulihan P2TP2A Jakarta dan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial LPKS Handayani dicapai kesepakatan yang salah satunya menempatkan ke sembilan anak tersebut dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan/LPKS selama 3 bulan. Namun pada kenyataannya hasil pengambilan keputusan dan diversifikasi tersebut tidak sesuai dengan pelaksanaannya, hal ini dikarenakan anak-anak yang seharusnya menjalani pendidikan dan pelatihan selama 3 tiga bulan sudah dikeluarkan dari LPKS sebelum jangka waktunya berakhir. Dengan kejadian tersebut tentunya membawa dampak negatif baik bagi Kepolisian, lembaga terkait P2TP2A untuk melakukan pembinaan dan konseling maupun bagi diri si anak. Berkenaan dengan penyidik kepolisian dalam menerapkan konsep diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dapat dikaji permasalahan mengenai bagaimana tugas dan wewenang kepolisian serta lembaga lain terkait implementasi pengambilan keputusan dan diversifikasi dan hambatan-hambatan yang dihadapi penyidik Kepolisian dan lembaga terkait serta solusi bagi Kepolisian dan lembaga terkait implementasi pengambilan keputusan dan diversifikasi pada masa depan. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normative yang didukung dengan penelitian lapangan yang dilakukan dengan cara melakukan wawancara dengan informan, analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan metode pengumpulan data primer dan sekunder.

<hr>

### <b>ABSTRACT</b><br>

One of cases handled by the PPA Unit of Central Jakarta Police was bullying taking place at one of shopping centers in Jakarta by some students to minors. In handling the case, the Police, based on Law Number 11 Year 2012 on Child Criminal Justice System and Government Regulation No. 65 of 2015 on Guidelines for the Implementation of Diversion and Handling of Children Not Yet Aged 12 Twelve Years, applied restorative justice by implementing diversion for Children in Conflict with the Law who were aged 12 and above and decision making for children aged 12 and under. In a meeting attended by victims and children as criminal actors with their families, community counselors, legal counsels, Psychological Service and Recovery Division of P2TP2A Jakarta and Social Welfare Institution LPKS Handayani, an agreement

was reached which one of them placed the nine children in education or training in educational institution LPKS for 3 months. But in reality, the results of decision making and diversion were not in accordance with the implementation, this was because children who should undergo education and training for 3 three months had been excluded from the LPKS before the end of the term set. Such incident, certainly, had a negative impact on both the Police, related institution P2TP2A conducting coaching and counseling, and on the children themselves. With regard to police investigators in applying the concept of diversion to children in conflict with the law, it is possible to examine the issue of how the duties and authorities of the police and other institutions related to the implementation of decision making and the diversion as well as obstacles faced by Police investigators and related institutions and solutions for Police and related institutions in the implementation of decision making and diversion in the future. This study used normative juridical research supported by field research conducted by conducting interviews with informants, while data analysis used was a qualitative analysis with primary and secondary data collection methods.